

# **LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)**

**DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**



# LHKPN

Daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan) yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

## • Manfaat pelaporan harta

- Penanaman sifat keterbukaan dan tanggung jawab;
- Penyediaan sarana kontrol masyarakat;
- Kerapihan administrasi dokumen harta;
- Menghindari fitnah.

# Dasar Hukum LHKPN

UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN

UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KEP KPK Nomor 07 / KPK / 2 / 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN

# Kewajiban PN (UU 28 Tahun 1999)

## Pasal 5 ayat (2)

- Bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat

## Pasal 5 ayat (3)

- Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat

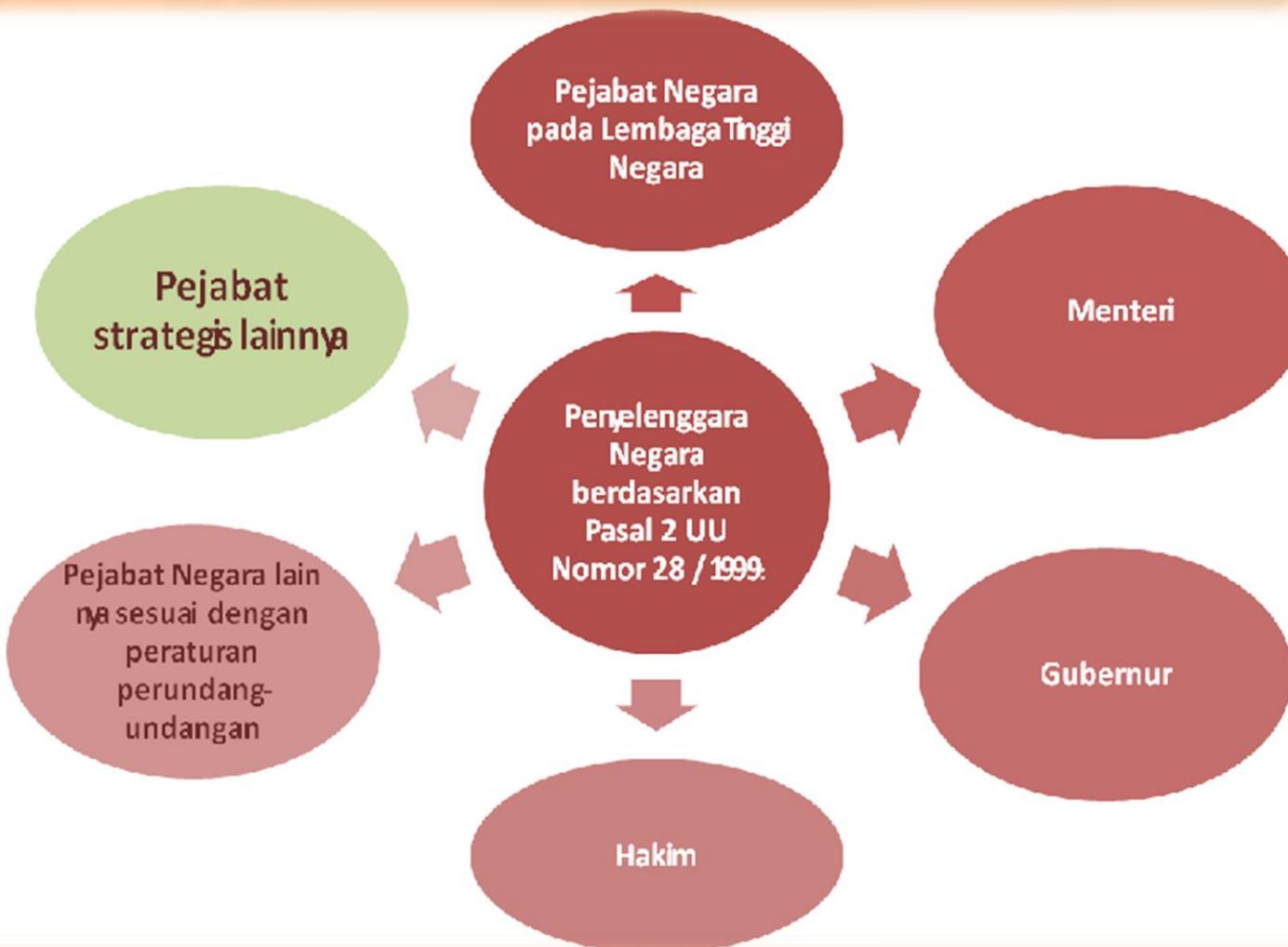
# Kewenangan KPK

(UU 30 Tahun 2002)

Pasal 13 Huruf a

Dalam rangka melaksanakan tugas  
Pencegahan, KPK berwenang  
melakukan Pendaftaran &  
Pemeriksaan LHKPN

# Wajib Ihkpn menurut UU No. 28 Th 1999 PASAL 2



# Penjelasan UU No. 28 Th 1999 Pasal 2, angka (7)

## Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis :

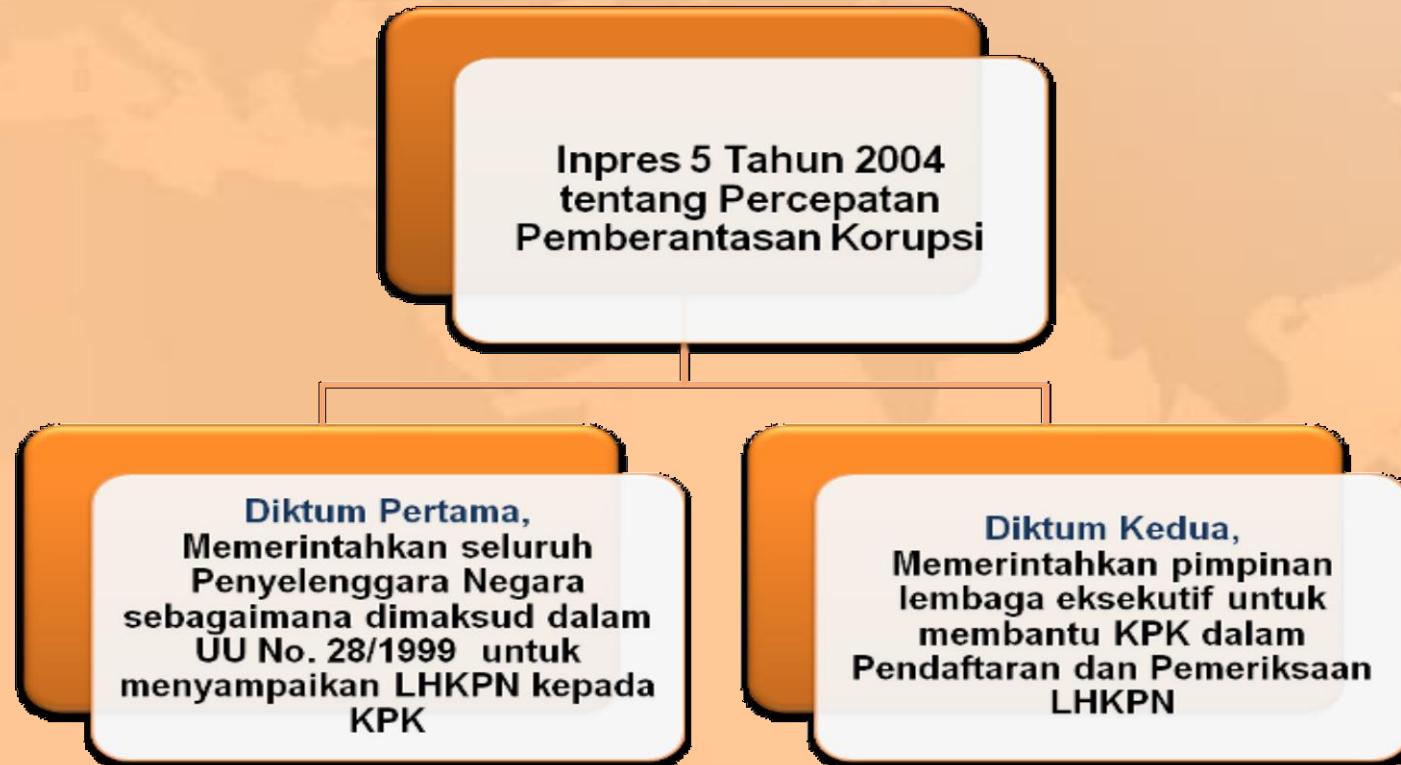
- Direksi, Komisaris & Pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD
- Pimpinan Bank Indonesia
- Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
- Pejabat Es. I dan Pejabat lain yang disamakan
- Jaksa
- Penyidik
- Panitera Pengadilan
- Pemimpin & bendaharawan proyek

# WAJIB LHKPN SESUAI DENGAN UU No. 32 Th.2004 Pasal 58

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
adalah WNI yang memenuhi syarat :

- (i) menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan

# Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan KORUPSI



# Regulasi Pendukung untuk Eksekutif (1)

## SURAT EDARAN MENPANRB

**SE/05/M.PAN/4/2006**

Memerintahkan Pimpinan Instansi untuk:

- Mengeluarkan Penetapan Wajib LHKPN
- Menugaskan Unit Kepegawaian untuk mengelola LHKPN
- Menugaskan SPI untuk memonitor Penyampaian LHKPN

**SE/01/M.PAN/2008**

Memerintahkan Pimpinan Instansi untuk:

- Tidak mengusulkan PNS untuk menduduki Jabatan apabila tidak menyampaikan Jabatan
- Tidak melantik PNS yang diangkat dalam Jabatan apabila yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN

**SE MENPANRB**

**No.05 Th. 2012**

Kewajiban  
Penyampaian dan  
Sanksi Atas  
Keterlambatan  
Penyampaian LHKPN di  
Lingkungan  
Kementerian/ Lembaga  
dan Pemerintah  
Daerah

# Regulasi Pendukung untuk Komisi Pemilihan Umum

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR : 53/SK/KPU/TAHUN 2008**

Tentang

**PENETAPAN WAJIB LAPOR KEKAYAAN BAGI PEJABAT YANG  
MEMANGKU JABATAN STRATEGIS DAN POTENSIAL/RAWAN  
KKN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA**

# Formulir LHKPN

**LHKPN MODEL KPK-A**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

LHKPN MODEL KPK-A



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Diisi oleh PN/Pejabat Wajib LHKPN yang  
untuk yang pertama kalinya

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

LHKPN MODEL KPK-B



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR PERUBAHAN DATA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

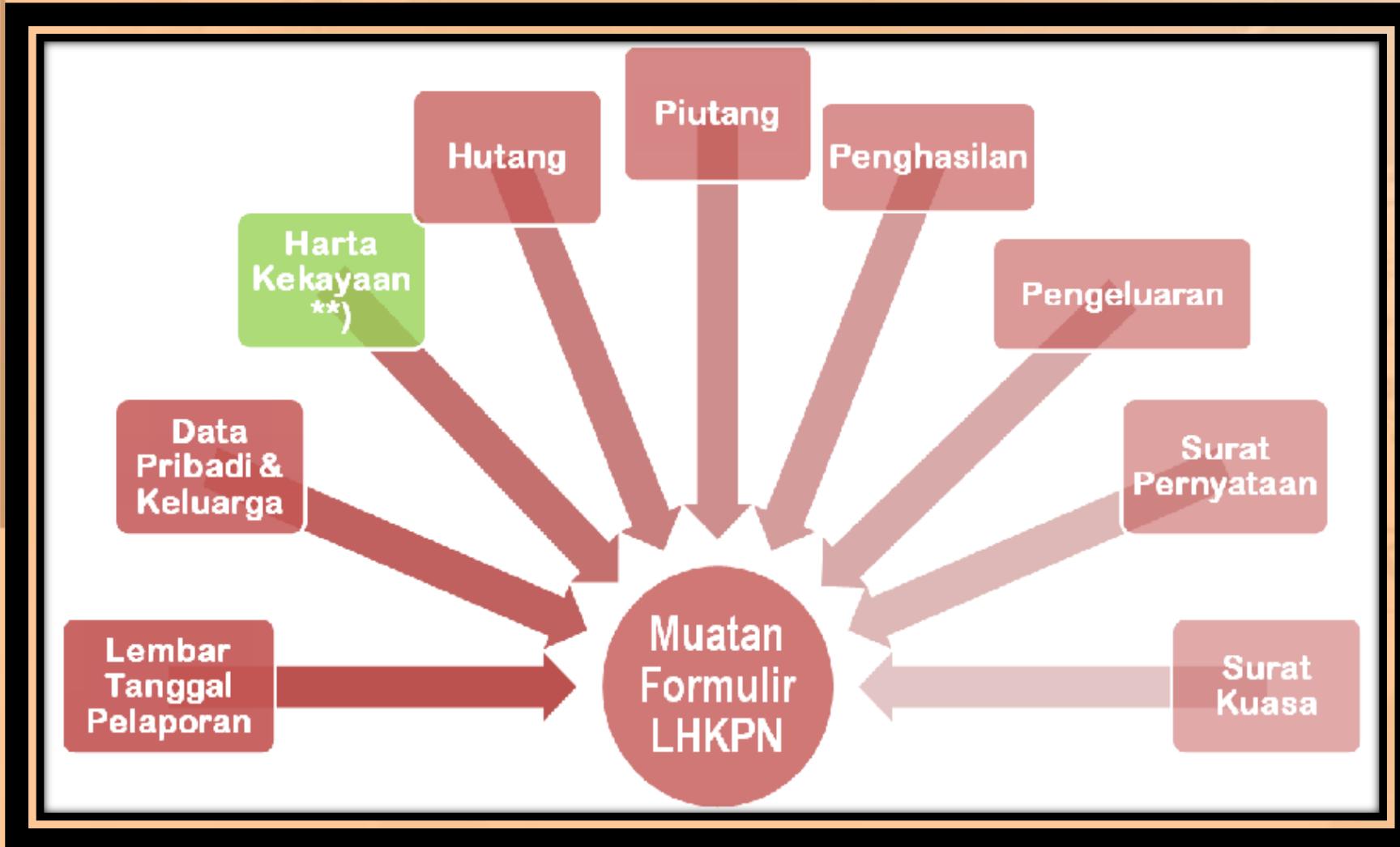
PER : \_\_\_\_\_  
(Tgl./Bln./Thn.)

71182008

Diisi oleh PN/Pejabat Wajib LHKPN yang  
telah menyampaikan LHKPN Model  
KPK-A, apabila:

1. Mengalami perubahan jabatan  
(mutasi/promosi/pensiun)
2. Dua tahun dalam jabatan yang sama
3. Sewaktu-waktu atas permintaan KPK

# Muatan LHKPN



# Harta yang dicantumkan



# Kepemilikan Harta

**ATAS NAMA:**

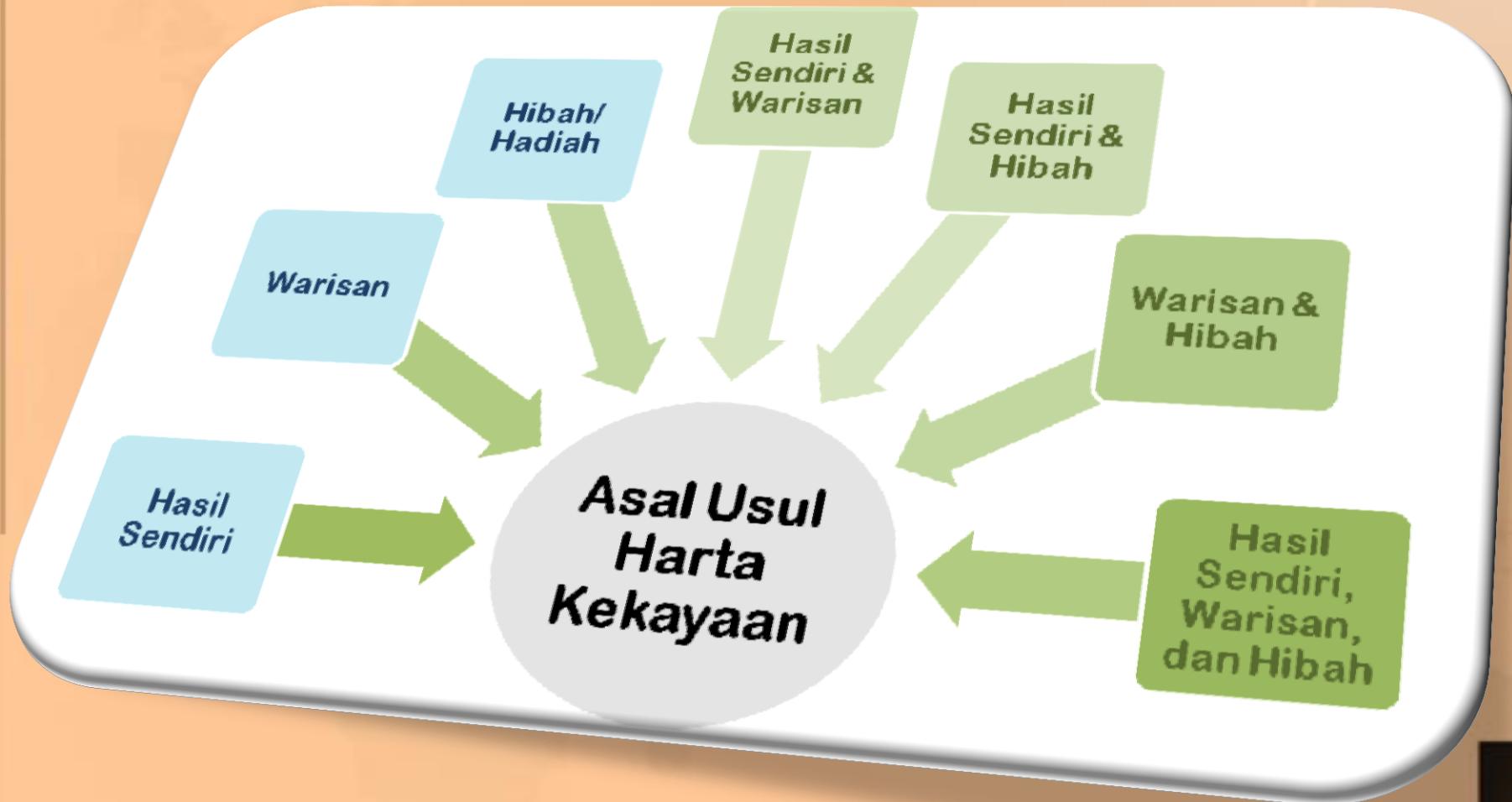
.....

**HUBUNGAN KELUARGA:**

1. Yang bersangkutan
2. Isteri/Suami
3. Anak
4. Lainnya \*

*\*: Kekayaan milik Penyelenggara Negara atau Keluarga namun yang belum dibaliknamakan.*

# Asal usul harta



# Cara Memperoleh Formulir

**Mengunduh dari [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)**

**Memfotokopi Formulir LHKPN sesuai kebutuhan**

**Mengajukan permintaan kepada Direktorat  
Pendaftaran & Pemeriksaan LHKPN (Costumer  
Services)**

**TIDAK HARUS  
MENGGUNAKAN  
FORMULIR ASLI**

# Tips Pengisian Formulir LHKPN

**Kumpulkan semua dokumen pendukung atau bukti kepemilikan harta.**

**Isi formulir LHKPN secara jujur, benar dan lengkap.**

**Susun dokumen pendukung sesuai dengan susunan formulir LHKPN.**

**LHKPN dan pendukungnya jangan di jilid atau distapler, gunakan clip binder.**

**Copy formulir dan dokumen pendukung untuk arsip, sebagai dasar dalam pengisian formulir selanjutnya.**

NHK 4456



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

2009

T a m b a h a n      B e r i t a      N e g a r a      R . I .      T a d u g a l      6 O k t o b e r 2 0 0 9      N o .      8 0  
Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28  
Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BIDANG : EKSEKUTIF  
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| 1. Nama                   | : | WAHYUDI  |
| 2. Jabatan                | : | BENDAHARA – DINAS PERTAMANAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG |
| 3. Tempat & Tanggal Lahir | : | BANDUNG, 12 Juni 1980                                |
| 4. Jenis Kelamin          | : | LAKI-LAKI  |
| 5. Nama Istri             | : | NY. SRIKANDI   |
| 6. Alamat Kantor          | : | JL. RAYA BANDUNG NO. 121                             |
| 7. Tanggal Pelaporan      | : | 20 Agustus 2009                                      |

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)	Rp.	77.220.000
1. Tanah seluas 110 m <sup>2</sup> , di Kota JAKARTA TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2006, NJOP Rp.77.220.000		
B. HARTA BERGERAK	Rp.	
a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA	Rp.	11.000.000
1. Motor, merk SUZUKI THUNDER, tahun pembelian 2007 milik jual Rp.11.000.000		
b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEBUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA	Rp.	0
c. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	60.000.000
1. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2006 sampai dengan 2009 dengan nilai jual Rp.60.000.000		
C. SURAT BERHARGA	Rp.	0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	Rp.	40.936.460
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp 40.936.460		
E. PIUTANG	Rp.	0
TOTAL HARTA (II)	Rp.	189.156.460
III. HUTANG	Rp.	0
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp.	189.156.460

MENGETAHUI,  
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN  
DEPUTI

Jakarta, 10 September 2009  
DATA DIPROSES OLBH,  
DIREKTORAT PENDAFTARAN  
DAN PEMERIKSAAN LHKPN  
DIREKTUR

TOH



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

2012

B 1

Tambahan Berita Negara RI Tanggal 6 Maret 2012 No. 19

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)

**BIDANG : EKSEKUTIF**  
**LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : WAHYUDI
2. Jabatan : BENDAHARA – DINAS PERTAMANAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
3. NIK : 4456
4. Tempat & Tanggal Lahir : BANDUNG, 12 Juni 1980
5. Alamat Kantor : JL. RAYA BANDUNG NO. 121
6. Tanggal Pelaporan : 20 Agustus 2009, 31 Desember 2011

Status Laporan

	20 Agustus 2009	31 Desember 2011
Rp.	77.220.000	Rp. 228.240.000
Rp.	77.220.000	Rp. 228.240.000
Rp.	—	—

**II. DATA HARTA**

**A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)**

1. Tanah seluas 110 m<sup>2</sup>, di Kota JAKARTA TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008 (Penambahan Data Baru) Kepada suami
2. Tanah & bangunan seluas 120 m<sup>2</sup>, di Kota JAKARTA TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI / perolehan tahun 2010 (Penambahan Data Baru)

**B. HARTA BERGERAK**

**a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA**

1. Motor, merk SUZUKI THUNDER, tahun pembuatan 2007, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2007 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)
2. Motor, merk HONDA BEAT, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari HIBAH, perolehan tahun 2009 (Penambahan Data Baru)

**b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA**

**c. HARTA BERGERAK LAINNYA**

1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN HIBAH, perolehan tahun — (Penambahan Data Baru)
2. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI perolehan dari tahun 2004 sampai dengan 2009 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)

**3. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN HIBAH, perolehan tahun 2008 (Penambahan Data Baru, Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)**

**C. SURAT BERHARGA**

**D. GIRO DAN SETARA KAS**

**LAINNYA**

1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Harta Kekayaan, Perubahan Data Kas/Karena Penambahan/Penurangan)

**E. PIUTANG**

1. Piutang dalam bentuk PINJAMAN UANG (Penambahan Piutang Baru)

**TOTAL HARTA (II)**

**III. HUTANG**

1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN BARANG (Penambahan Hutang Baru)

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN ( II - III )**

MENGETAHUI,  
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN  
PLT. DEPUTI

	Rp. 60.000.000	Rp. 65.000.000
Rp.	40.936.460	Rp. 62.878.438
Rp.	40.636.460	Rp. 62.879.538
Rp.	—	20.512.738
Rp.	—	20.512.738
Rp.	169.166.460	Rp. 469.632.274
Rp.	—	358.000.000
Rp.	—	358.000.000
Rp.	169.166.460	Rp. 53.632.274

Jakarta, 6 Februari 2012

DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN (DHPN)  
DIREKTUR

# Anti Corruption Clearing House (ACCH)

- ❖ Anti Corruption Clearing House (ACCH) dirancang sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang terdistribusi secara terbuka untuk public “*public knowledge management*” dalam upaya membangun **semangat, visi, dan budaya antikorupsi.**
- ❖ KPK mengembangkan ACCH sebagai salah satu pilar strategi pencegahan korupsi, dan merupakan platform jejaring antikorupsi dalam menjalankan misi pemberantasan korupsi di Indonesia.

# PORTAL ACCH

## <http://acch.kpk.go.id>

❖ Anti Corruption Clearing House (ACCH) terimplementasi dalam beberapa program diantaranya adalah **PORTAL ACCH**.

### ❖ **PORTAL ACCH**

[\*\*http://acch.kpk.go.id\*\*](http://acch.kpk.go.id) Web portal ACCH sebagai wadah online yang berisi data dan informasi mengenai antikorupsi. Beberapa fitur yang terus dikembangkan adalah arsip penindakan (penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan) arsip sorotan kasus korupsi, data statistik, edukasi antikorupsi, tanya jawab anti korupsi, publikasi riset dan kajian dan lain-lain.

# MANUAL PORTAL ACCH

- ❖ Buka halaman website dengan alamat <http://acch.kpk.go.id>
- ❖ Ketik nama atau NHK (Nomor Harta Kekayaan) Penyelenggara Negara yang anda ingin ketahui TBN nya;
- ❖ Ketik kode validasi sesuai dengan gambar;
- ❖ Klik Go, maka akan ditampilkan daftar pengumuman (TBN) a.n. PN yang dimaksud secrat urut berdasarkan tanggal pelaporan;
- ❖ Klik View untuk memilih TBN dimaksud ;
- ❖ Lakukan Sign up (bagi yang belum memiliki account di website ACCH), untuk mendaftarkan email kita.
- ❖ Lakukan Login dengan memasukkan email dan password sesuai dengan yang kita daftarkan sebelumnya;
- ❖ TBN akan ditampilkan dalam pop up, tanpa tombol Save.

# <http://acch.kpk.go.id>

The screenshot shows the homepage of the Anti Corruption Monitoring House (ACCH) website. At the top, there is a navigation bar with links to BERANDA, EDUKASI, PENINDAKAN, STATISTIK, PUBLIKASI, and TENTANG ACCH. The main content area features a map of Solok Regency with various districts labeled. A central box contains the title "TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK KABUPATEN SOLOK - SUMATERA BARAT" and a subtitle "Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik". Below this, a text box states: "Sepuluh tahun berjalan, perlulah dilakukan pengukuran tentang tingkat keberhasilan Kabupaten Solok dalam melaksanakan berbagai praktik good government." To the right, a section titled "Sorotan Kasus" features a photo of Muhammad Nazaruddin and his profile information.

**Sorotan Kasus**

**Muhammad Nazaruddin**

Ketika menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014, ia menerima hadiah berupa 5 (lima) lembar cek senilai Rp. 4,675 Miliar. Dan ia pun divonis pidana penjara 7 tahun.

**Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (TBN LHKPN)**

Search: abdullah hehamhua  
Validation: 830 (Case Insensitive) 1

2 8 3 0 Go

Nama 1

Pencarian... 2

**KATALOG BUKU PERPUSTAKAAN KPK**

# <http://acch.kpk.go.id>

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (TBN LHKPN)

Search: abdullah hehamahua Nama

Validation:  908 Go

Nama	Jabatan	Lembaga	NHK	Pelaporan	
ABDULLAH HEHAMAHUA	PENASEHAT-	KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGAF NEGARA (KPKPN)	3	16-03-2009	<a href="#">View</a>
ABDULLAH HEHAMAHUA	PENASEHAT-	KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGAF NEGARA (KPKPN)	3	01-04-2005	<a href="#">View</a>
ABDULLAH HEHAMAHUA	WAKIL KETUA	KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGAF NEGARA (KPKPN)	3	20-02-2001	<a href="#">View</a>

# <http://acch.kpk.go.id>

The screenshot shows a web application interface for reporting assets. On the left, there's a sidebar with a search bar containing "abdullah hehamahua". Below it are sections for "Validation" and "Nama", "Jabatan", and "Lembaga". The main content area displays a table of asset reports for "ABDULLAH HEHAMAHUA". The table columns are "Nama", "Jabatan", "Lembaga", "Kewajiban", "Tipe", "Nilai", "Status", and "View". Three rows are shown:

Nama	Jabatan	Lembaga	Kewajiban	Tipe	Nilai	Status	View
ABDULLAH HEHAMAHUA	PENASEHAT-	KOMISI PEMERIKSA KORUPSI (KPK)	3	01-04-2005	0	Approved	<a href="#">View</a>
ABDULLAH HEHAMAHUA	PENASEHAT-	KOMISI PEMERIKSA KORUPSI (KPK)	3	20-02-2001	0	Approved	<a href="#">View</a>
ABDULLAH HEHAMAHUA	WAKIL KETUA	KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN	3	20-02-2001	0	Approved	<a href="#">View</a>

A central modal window titled "Please Sign up or Login" contains two buttons: "Sign Up" (circled in red) and "Login" (circled in blue). Below these buttons are fields for "Full name", "E-mail", and "Password". A dropdown menu for "Reason" is set to "Informasi LHKPN". At the bottom of the modal are "Sign Up" and "Login" buttons.

To the right of the modal, there's a sidebar with a search bar and a section titled "Hadiah". It lists a gift for "Abdullah Hehamahua" as a DPR RI member who received a 5-year term with a value of Rp. 4,675 Miliar. Below this is a banner for "E-LEARNING GRATIFIKASI" featuring the KPK logo and a book icon.

**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

# <http://acch.kpk.go.id>

View Detail

6

1 page of 5 125%

2011

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 12 Agustus 2011 No.64  
Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)

BIDANG : EKSEKUTIF  
LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

I. DATA PRIBADI

1. Nama	: ABDULLAH HEHAMAHUA
2. Jabatan	: PENASEHAT
3. NHK	: 3
4. Alamat Kantor	: JI. HR. RASUNA SAID KAV. C-1, JAKARTA SELATAN
5. Tanggal Pelaporan	: 11 Juni 2007, 16 Maret 2009

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

Rp.	114.622.500	Rp.	154.602.500
-----	-------------	-----	-------------

Status Laporan

11 Juni 2007	16 Maret 2009
--------------	---------------

7

ABDULLAH HEHAMAHUA

Jabatan: PENASEHAT

Lembaga: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

NHK: 3

Pelaporan: 16-03-2009

Disclaimer:

Informasi yang ditampilkan pada situs ini merupakan ikhtisar dari dokumen yang diumumkan pada Berita Negara/Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan upaya hukum

16-03-2009

Mari Berkontribusi

You can **stop**

**CORRUPTION**



**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

# Caranya?



Kita mulai dari keluarga:

- Saling menanyakan asal-usul barang atau uang
- Saling mengingatkan
- Penanaman sifat kejujuran

Ingatkan untuk kebaikan

PLAY

**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

# KPK

.Komisi Pemberantasan Korupsi

.Alamat

- Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 1, Jakarta 12920
- Telp. (021) 2557 8300
- Website : [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

.LHKPN

- Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
- Telp. (021) 2557 8396
- Faks. (021) 5292 1230, (021) 5292 1231
- Email: [Informasi.lhkpn@kpk.go.id](mailto:Informasi.lhkpn@kpk.go.id) / [pendaftaran.lhkpn@kpk.go.id](mailto:pendaftaran.lhkpn@kpk.go.id)